

STRATEGI POPULISM PROGRESSIVE MARHENIMSE SOSIO DEMOKRASI DAN SOSIO – DIGITAL

Erik ardiyanto

Ketua Badan Otonom Pendidikan dan Pelatihan DPP Persatuan Alumni GMNI
Universitas Paramadina

Korespondensi: erik.ardiyanto@paramadina.ac.id

Submitted : 8 Agustus 2025

Published : 10 Oktober 2025

Abstrak

Tulisan ini membahas meningkatnya populisme kanan di Indonesia yang memanfaatkan politik identitas berbasis rasial, keagamaan, dan kesukuan, yang berpotensi memperburuk polarisasi sosial. Populisme ini sering didorong oleh tokoh politik, pendakwah radikal, dan kelompok ekstrem, terutama melalui media sosial. Fenomena ini menunjukkan pergeseran dari politik kelas menuju politik identitas yang lebih sektarian, yang berisiko menumbuhkan ketegangan sosial. Dalam kerangka ini, ruang publik ideal menurut Jürgen Habermas seharusnya menjadi tempat untuk menciptakan keadilan sosial dan inklusivitas.

Sebagai alternatif terhadap demokrasi liberal, tulisan ini mengusulkan konsep demokrasi deliberatif dan sosio-demokrasi, yang menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam diskursus politik untuk mencapai keadilan sosial. Demokrasi deliberatif fokus pada penguatan solidaritas sosial, sementara sosio-demokrasi menekankan kebebasan politik dan ekonomi yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam menghadapi populisme kanan, penting bagi kaum marhenis untuk memperkuat politik kelas dan mengedepankan narasi inklusif. Selain itu, peran media sosial dan kolaborasi organisasi masyarakat sipil juga sangat penting untuk menghadapi tantangan ini.

Kata Kunci: *Populisme Kanan, Politik Identitas, Demokrasi Deliberatif, Sosio-Demokrasi, Marhaenisme*

Latar Belakang

Pembahasan mengenai sistem "Demokrasi" sering kali mengacu pada model demokrasi Barat yang berkembang di Eropa. Namun, dalam praktiknya, setiap negara memiliki penerapan demokrasi yang dipengaruhi oleh konteks historis dan budaya masing-masing. Demokrasi harus diakui sebagai sistem yang paling baik, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk menyuarakan pendapat dan opini mereka. Demokrasi juga sejalan dengan ideologi negara kita, yaitu Pancasila, yang lahir pada 1 Juni 1945. Kelima sila dalam Pancasila dapat diterapkan melalui mekanisme demokrasi. Namun, demokrasi juga menghadirkan dilema terkait munculnya kekuatan-kekuatan politik yang seolah demokratis tetapi justru telah menghancurkan sistem demokrasi itu sendiri dari dalam, seperti menguatnya politik dinasti yang melakukan cara apapun untuk mempertahankan kekuasaannya. Begitupun dengan bentuk narasi populis kanan dalam upaya untuk menggantinya dengan sistem lain, seperti monarki, diktator, atau bahkan khilafah.

Kondisi ini seringkali dipengaruhi oleh fakta bahwa demokrasi liberal yang diterapkan belum mampu menjawab seluruh persoalan bangsa saat ini. Lebih lanjut, corak ekonomi neoliberalisme yang diusung dalam demokrasi liberal telah memperburuk ketimpangan sosial antar kelas, bahkan menyebabkan peningkatan kemiskinan ekstrem, khususnya di global south atau negara-negara dunia ketiga. Di Indonesia, demokrasi telah diselewengkan oleh sebagian elite oligarki untuk mempertahankan kekayaan material dan kekuasaan mereka melalui jalur politik elektoral, atau dengan menjadi donatur bagi para kontestan politik. Akibatnya, tawaran politik atau kandidat yang maju dalam kontetasi yang ada, lebih banyak dipilih oleh kalangan oligarki dan kita dipaksa untuk menerimanya, bukan merupakan tawaran yang muncul dari kehendak dan suara rakyat (Erik, 2023)

Sejak terjadinya krisis kapitalisme neoliberalisme pada tahun 2008, yang berawal dari jatuhnya pasar hipotek subprima di Amerika Serikat, dunia mengalami dampak ekonomi yang sangat besar. Krisis ini kemudian berkembang menjadi krisis perbankan internasional yang serius, ditandai dengan kegagalan bank investasi Lehman Brothers yang menjadi titik balik runtuhnya sistem keuangan global. Untuk menghindari kehancuran total, banyak negara yang harus mengeluarkan dana talangan dan menyelamatkan institusi keuangan besar. Dampak dari krisis ini terasa di seluruh dunia, dengan penurunan ekonomi yang tajam, pengangguran yang meluas, serta memicu krisis utang di negara-negara berkembang dan negara maju. Krisis ini juga menyoroti kelemahan sistem kapitalisme neoliberalisme yang tidak mampu mengatur ketimpangan ekonomi dan memberikan solusi atas ketidakstabilan pasar global (Harvey, D. 2005).

Situasi ini semakin diperburuk dengan kemunculan pandemi COVID-19 yang menunjukkan bahwa kapitalisme tidak dapat memberikan solusi yang efektif dalam menghadapi krisis global. Pandemi ini telah menyebabkan krisis kesehatan yang meluas, meruntuhkan sistem kesehatan di berbagai negara, dan mengguncang perekonomian global. Banyak negara yang bergulat dengan fluktuasi ekonomi yang tajam, ketidakpastian politik, serta peningkatan ketimpangan sosial. Kapitalisme terbukti tidak mampu menghadapi tantangan besar seperti pandemi ini, yang memperlihatkan kelemahan sistem yang hanya menguntungkan segelintir pihak sementara banyak pihak lainnya terpuruk dalam kemiskinan dan ketidakpastian.

Selain itu, dunia saat ini juga menghadapi krisis lingkungan yang semakin memburuk, dengan perubahan iklim yang memperburuk bencana alam, kelangkaan sumber daya alam, serta kerusakan ekosistem. Sektor pendidikan juga terpuruk di banyak negara, di mana akses pendidikan berkualitas semakin terbatas dan mahal. Di sisi lain, krisis politik juga semakin memperburuk ketidakstabilan global, dengan munculnya gerakan populisme kanan yang memanfaatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap elit politik dan ketidakadilan ekonomi.

Gerakan populisme kanan yang semakin menguat di berbagai belahan dunia menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk situasi. Tokoh-tokoh populis seperti Donald Trump di Amerika Serikat, Borin Jhonson di Inggris, Jair Bolsonaro di Brasil, Rodrigo Duterte, Bong Bong Marcos di Filipina, dan Recep Tayyip Erdoğan di Turki, berhasil meraih kekuasaan dengan membangun narasi populis yang menggugah sentimen-sentimen kebencian dan ketakutan. Mereka sering kali mengusung isu-isu seperti anti-imigrasi, rasisme, dan anti-Islam, serta politik identitas yang memecah belah masyarakat.

Di Inggris, fenomena Brexit yang terjadi pada 2016 juga mencerminkan bagaimana narasi populis dimainkan oleh kelompok ultra-kanan. Tokoh seperti Boris Johnson menggambarkan imigran, terutama yang berasal dari Eropa Timur dan Timur Tengah, sebagai ancaman besar bagi masyarakat Inggris. Dalam kampanye Brexit, mereka membangun narasi bahwa imigran merebut pekerjaan, memperburuk tingkat kriminalitas, dan meningkatkan biaya hidup di Inggris. Mereka memanfaatkan media sosial untuk memperkuat polarisasi antara "pribumi"

dan "imigran", serta memanipulasi rasa takut akan perubahan sosial untuk mendukung keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Goodwin, M., & Heath, 2016). Sikap ini bertentangan dengan prinsip dasar Uni Eropa yang mengharuskan negara-negara anggotanya untuk menerima imigran, terutama dari negara-negara yang sedang mengalami konflik.

Situasi populisme kanan yang memainkan narasi kebencian terhadap "aku" dan "mereka" sebagai kelompok yang dianggap "lain" (the other) digambarkan oleh McIntyre dengan istilah "*Post-Truth*" atau "Pasca-Kebenaran". Istilah ini merujuk pada penguburan fakta objektif oleh mereka yang memanfaatkan sentimen populisme dengan menarik sisi emosional dan keyakinan personal. *Post-Truth* bukan sekadar kebohongan, melainkan sebuah bentuk supremasi ideologi di mana para pelakunya berusaha memaksa seseorang untuk mempercayai sesuatu, meskipun tidak ada bukti yang mendukungnya. McIntyre menjelaskan, "*Post-Truth*" adalah sebuah bentuk ideologi yang mencoba untuk meyakinkan orang untuk mempercayai narasi tertentu, tanpa mempertimbangkan bukti empiris yang ada (Lee McIntyre, 2018:13). Dalam hal ini, kita bisa melihatnya sebagai bentuk supremasi ideologi kanan, di mana para tokoh populis memaksakan keyakinan mereka kepada publik, meskipun narasi tersebut tidak didasarkan pada fakta yang valid.

Di Amerika Serikat, Donald Trump memainkan narasi nasionalisme chauvinistic dengan kembalinya Amerika atau (America First) sebagai slogan dalam dua kali kampanye pencalonannya. Namun narasi nasionalisme itu ditafsirkan dalam sebuah narasi anti-imigran dengan menganggap imigrasi sebagai ancaman bagi identitas dan kesejahteraan negara. Fenomena ini diperkuat dengan munculnya ideologi supremasi kulit putih, yang menganggap bahwa orang kulit putih lebih tinggi derajatnya secara rasial dibandingkan dengan orang kulit hitam. Ironisnya, meskipun secara historis orang kulit putih di Amerika bukanlah penduduk asli, melainkan imigran yang datang dari Eropa, saat ini terdapat upaya untuk memutarbalikkan sejarah. Mereka yang berkulit putih kini digambarkan seolah-olah mereka adalah warga asli Amerika Serikat, sementara mereka yang berkulit non-putih dianggap sebagai "pendatang" atau "imigran", meskipun kenyataannya mereka telah tinggal di negara tersebut selama beberapa generasi.

Gerakan supremasi kulit putih ini sering kali dinarasikan dalam bentuk populisme di ruang publik dan telah menjadi sistemik di Amerika Serikat. Narasi ini semakin kuat dengan dukungan dari politisi populis sayap kanan, yang banyak terafiliasi dengan Partai Republik. Kelompok supremasi kulit putih ini sebagian besar merupakan konstituen atau pemilih dari Partai Republik, yang mendukung ideologi tersebut sebagai bagian dari identitas politik mereka. Gerakan ini semakin menguat dengan hadirnya tokoh-tokoh populis yang terus memperkuat narasi kebencian dan diskriminasi rasial, serta memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan mereka.

Dalam konteks ini, populisme tidak hanya menjadi alat untuk meraih kekuasaan politik, tetapi juga memperburuk polarisasi sosial dengan menumbuhkan sentimen kebencian dan ketakutan terhadap kelompok lain. Supremasi ideologi kanan, yang semakin mengakar dalam masyarakat, memperlihatkan betapa manipulasi narasi dan pengabaian fakta objektif dapat membentuk opini publik yang jauh dari kenyataan.

Pembahasan

Naiknya Populisme Kanan Di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, akhir-akhir ini kita tanpa disadari tengah hidup dalam suatu momen populisme kanan yang semakin menguat. Meskipun populisme di Indonesia memiliki narasi yang berbeda dibandingkan dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat atau Inggris, tetapi dari sisi esensinya bisa dikatakan serupa. Di Amerika Serikat, populisme sering berbentuk

rasial, terkait dengan diskriminasi warna kulit, sementara di Inggris lebih berfokus pada isu pribumi versus imigran. Di Indonesia, populisme lebih berwujud dalam politik identitas, meskipun corak dasarnya tetap serupa, yaitu menggunakan sentimen untuk meraih dukungan dalam kontestasi.

Hal ini dapat kita amati dalam dua kali pemilihan umum presiden terakhir di Indonesia, dan bahkan hingga hari ini, fenomena ini masih terus berkembang. Banyak politisi kanan, tokoh publik, pendakwah radikal, organisasi kemasyarakatan kepemudaan, serta selebritas yang "hijrah" secara politik, aktif mengglorifikasi politik identitas melalui penggalangan sentimen rasial, keagamaan, kesukuan, intoleransi, dan xenofobia. Mereka menggunakan ruang publik sebagai arena untuk menyebarkan narasi-narasi yang penuh dengan ujaran kebencian (*hate speech*), berita bohong (*hoax*), serta kesesatan logika (*logical fallacy*) yang sengaja dirancang untuk memecah belah bangsa.

Pertanyaannya adalah, apakah inilah ruang publik yang kita kehendaki? Jika merujuk pada nilai-nilai perjuangan kaum marhaenis dalam memperjuangkan hak-hak kaum marhaen, maka ruang publik yang diisi oleh politik identitas ini jelas tidak menguntungkan bagi mereka. Politik identitas dalam populisme seringkali menghilangkan perspektif politik kelas yang seharusnya menjadi basis material perjuangan kaum marhaenisme. Politisi dan kelompok-kelompok ekstrem kanan lebih cenderung fokus pada isu-isu permukaan yang memecah belah, daripada menangani isu-isu struktural seperti ketimpangan ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh rakyat marhaen.

Menurut Jürgen Habermas, ruang publik yang ideal adalah ruang diskursus di mana narasi-narasi yang dihasilkan dapat menciptakan keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negara. Dalam ruang publik yang sehat, aktor-aktor intelektual progresif dan gerakan masyarakat berperan aktif untuk mengangkat isu-isu imanen yang ada di masyarakat, seperti kemiskinan, kesetaraan, intoleransi terhadap minoritas, penindasan, dan keadilan sosial. Dengan demikian, ruang publik seharusnya menjadi arena yang mendorong dialog konstruktif, bukan tempat bagi narasi-narasi yang memecah belah dan memperburuk polarisasi sosial.

Penting bagi kita untuk kembali mempertanyakan apakah politik identitas yang berlarut-larut ini akan memberikan solusi bagi masalah bangsa, atau justru akan semakin memperburuk ketidakadilan sosial dan memperlebar jurang pemisah antar kelompok dalam masyarakat. Apa yang kita butuhkan saat ini adalah ruang publik yang mampu menyatukan, bukan memecah belah, dan yang memberikan kesempatan bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi secara setara dan adil.

Ruang publik, atau *public sphere*, tidak hanya terbatas pada ruang diskusi, mimbar bebas, kampus, atau media mainstream. Dalam sistem demokrasi yang terus berkembang, ruang publik juga mengalami perluasan seiring dengan datangnya era digital, yang termanifestasikan melalui media sosial sebagai arena baru bagi ruang publik. Media sosial, sebagai ruang publik digital, menyimpan sebuah paradoks: di satu sisi, ia memungkinkan partisipasi warga dalam proses demokrasi, namun di sisi lain, ia sering dimanfaatkan oleh konglomerat digital untuk mendulang keuntungan melalui algoritma yang mereka control (Fuchs, C.2017). Media sosial memberikan ruang bagi berbagai suara, namun seringkali juga dimanfaatkan untuk memanipulasi opini publik demi kepentingan bisnis.

Fenomena ini semakin terasa ketika masyarakat, terutama kalangan bawah atau *grassroots*, terpolarisasi akibat politik populisme dan politik identitas yang marak di dunia maya. Masyarakat seringkali terpecah belah dan termakan oleh informasi yang salah (*hoax*) serta ujaran kebencian. Namun, yang sering terlupakan adalah peran besar platform-platform digital besar seperti Google, Facebook, X Instagram, dan YouTube dalam memfasilitasi peristiwa-

peristiwa tersebut. Mereka tidak hanya menyediakan ruang bagi narasi-narasi yang memecah belah, tetapi juga mengambil keuntungan besar dari data pribadi pengguna. Data yang terkumpul dari perilaku pengguna ini kemudian diolah untuk menciptakan *surplus behavior* yang dijual kepada pengiklan dan digunakan untuk target pemasaran agregat (Zuboff, S. 2019). Platform-platform ini, pada dasarnya, tidak peduli dengan dampak sosial yang ditimbulkan akibat penyebaran hoax dan ujaran kebencian, yang dapat memperburuk kondisi sosial dan politik.

Kita sering terlena dan lupa untuk menuntut pertanggungjawaban dari penyedia platform digital yang kini menjadi bagian integral dari ruang publik demokrasi kita. Mereka menjadi kekuatan yang mengendalikan aliran informasi, namun jarang dimintai pertanggungjawaban atas dampak sosial yang ditimbulkan oleh algoritma mereka. Dalam kenyataannya, mode teknologi digital ini berkelindan erat antara institusi sosial dan institusi bisnis. Platform digital tidak hanya sekadar tempat untuk berinteraksi sosial, tetapi juga bagian dari ekosistem bisnis yang didorong oleh profit. Dengan demikian, penting bagi kita untuk menyadari bahwa ruang publik digital yang kita nikmati hari ini, meskipun memberikan kemudahan dan aksesibilitas, juga membawa tantangan besar dalam hal etika, tanggung jawab sosial, dan dampak jangka panjang terhadap kohesi sosial dan demokrasi kita.

Selain itu, dalam ruang publik kita, hadir pula sekelompok kekuatan politik Islam radikal yang semakin hari semakin kuat dan meningkat. Kelompok ini muncul secara terang-terangan dan tidak segan-segan membonceng politik tertentu untuk memuluskan agenda mereka. Dalam narasinya, mereka berusaha mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi Khilafah. Secara singkat, Khilafah dipahami sebagai bentuk ideologi transnasional yang menempatkan sistem kepemimpinan umum bagi umat Muslim di seluruh dunia, dengan menekankan penerapan syariat Islam dan hukum Islam sebagai pedoman bagi setiap warga negara. Kondisi ini, pada dasarnya, seolah-olah memaksa kita untuk kembali kepada Piagam Jakarta yang dulu ditentang oleh para pendiri bangsa, termasuk Bung Karno. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan keyakinan bangsa Indonesia saat ini, yang menjadikan Pancasila 1 Juni sebagai dasar ideologi negara. Pancasila mengandung nilai-nilai ketuhanan, kebinekaan, gotong royong, dan keadilan sosial yang mencerminkan semangat pluralisme dan keberagaman masyarakat Indonesia (Soekarno, 1963).

Kelompok Islam radikal ini tentu tidak tanpa perlawanan. Gerakan masyarakat sipil dan ormas-ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sering kali melakukan upaya-upaya kontra narasi di ruang publik, bahkan sampai pada praktik di akar rumput. Jika ditelisik dari sisi ideologi, tentu sangat kontras antara kelompok radikalisme agama ini dengan NU dan Muhammadiyah, yang cenderung mengusung paham Islam moderat. Paham radikalisasi agama ini jelas tidak menguntungkan bagi perkembangan Islam moderat di Indonesia, karena dapat mengancam kerukunan dan kedamaian antar umat beragama. Namun, dari sisi politik, keberhasilan NU dan Muhammadiyah dalam membendung narasi kelompok Islam radikal di ruang publik memberikan keuntungan besar secara politik populis. Hal ini dapat kita lihat dengan banyaknya kalangan politisi yang kini berusaha untuk mengidentifikasikan diri mereka dengan NU atau Muhammadiyah, mengingat pengaruh besar kedua ormas tersebut dalam pembentukan opini publik di Indonesia.

Pertanyaannya kemudian adalah, di mana posisi kaum marhenis dalam konteks perlawanan terhadap kelompok Islam radikal tersebut? Apa langkah-langkah yang sudah dijalankan oleh kaum marhenis untuk memenangkan hati rakyat marhen? Dalam menghadapi dinamika politik identitas dan radikalisasi agama, kaum marhenis harus memperjuangkan ruang publik yang inklusif, memperkuat solidaritas sosial, serta mengedepankan nilai-nilai keadilan sosial yang lebih luas. Kaum marhenis memiliki potensi untuk mengusung isu-isu yang lebih relevan

dengan kepentingan rakyat banyak, seperti pengentasan kemiskinan, keadilan ekonomi, dan perlindungan terhadap kelompok marginal. Melalui pendekatan ini, mereka bisa membangun narasi yang lebih konstruktif dalam melawan hegemoni politik identitas yang sering kali mengarah pada polarisasi sosial. Dalam konteks ini, penting bagi kaum marhenis untuk menyatukan kekuatan masyarakat civil, ormas-ormas moderat, dan kelompok progresif untuk membangun ruang publik yang damai, adil, dan inklusif bagi seluruh warga negara Indonesia.

Tawaran Alternatif Demokrasi Deliberatif dalam Sosio-Demokrasi

Pemahaman tentang penerapan demokrasi liberal sebagai solusi final dari berbagai bentuk demokrasi yang berkembang di negara-negara dunia ketiga kini semakin dipertanyakan. Fakta-fakta objektif yang ada, seperti kemiskinan atau pandemi COVID-19, menunjukkan bahwa demokrasi liberal sering kali gagal untuk memberikan solusi nyata. Di negara yang masih mempertahankan nilai-nilai komunitarian seperti Indonesia, gerakan gotong royong (warga bantu warga), lahir atas inisiatif warga yang saling membantu selama pandemi COVID-19, ternyata lebih efektif dalam menghadapi krisis, daripada prinsip individualisme yang ditawarkan oleh demokrasi liberal. Begitu juga dengan kekuatan ekonomi model kerakyatan yang berdikari, seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang pada akhirnya terbukti mampu menyelamatkan ekonomi Indonesia dari resesi, berbeda dengan model ekonomi neoliberalisme yang justru memperburuk ketimpangan.

Jurgen Habermas memperkenalkan konsep demokrasi deliberatif atau demokrasi radikal, yang berfokus pada kepentingan rakyat banyak. Demokrasi deliberatif ini bertentangan dengan demokrasi liberal yang berkembang di dunia ketiga. Ide demokrasi deliberatif berakar pada partisipasi dan aspirasi rakyat, dengan tujuan menyelaraskan kondisi zaman modern dengan prinsip-prinsip klasik tentang kedaulatan rakyat. Dalam demokrasi deliberatif, kekuasaan tertinggi tidak lagi berada di tangan segelintir elite atau oligarki, melainkan kembali berada di tangan rakyat (demos). Pertanyaan yang muncul adalah, rakyat yang mana? Rakyat dalam konteks ini adalah rakyat marhaen—seperti buruh, petani, pedagang asongan, kuli bangunan, dan pedagang kelontong. Oleh karena itu, masalah-masalah mendasar yang terjadi di masyarakat bawah dapat diangkat dan diterjemahkan dalam diskursus publik serta praktik politik yang lebih inklusif dan berpihak pada kebutuhan mereka.

Demokrasi deliberatif ini memiliki akar pemikiran yang sejalan dengan konsep sosio-demokrasi yang digagas oleh Bung Karno, sebagaimana tertuang dalam buku *Pokok-Pokok Ajaran Marhaenisme*:

"Sosio-demokrasi yang menempatkan kedua kakinya dalam masyarakat. Sosio-demokrasi tidak ingin mengabdikan pada satu golongan kecil kepentingan elite kekuasaan, tetapi demi kepentingan masyarakat. Sosio-demokrasi bukannya demokrasi ala Revolusi Prancis, ala Amerika Serikat, ala Nederland, ataupun ala Inggris. Tetapi ia demokrasi sejati yang mencari kebebasan politik dan ekonomi, kebebasan negeri, kebebasan rezeki. Sosio-demokrasi adalah demokrasi—politik dan demokrasi ekonomi" (Sukarno, 1932:54).

Dengan demikian, sosio-demokrasi mengusung prinsip demokrasi yang tidak hanya menjamin kebebasan politik, tetapi juga kebebasan ekonomi yang adil, untuk semua lapisan masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan gagasan untuk memberdayakan rakyat marhaen sebagai subjek utama dalam proses demokrasi, yang bukan sekadar menjadi objek politik bagi elite atau oligarki. Sebagai alternatif dari demokrasi liberal, demokrasi deliberatif dan

sosio-demokrasi menawarkan ruang bagi rakyat untuk lebih aktif dalam menentukan arah kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan kolektif, bukan hanya segelintir orang atau kelompok tertentu.

Dengan menempatkan kembali sosio-demokrasi sebagai pijakan dasar dalam kerangka demokrasi Indonesia, bukan berarti kita bermaksud mengganti secara total sistem demokrasi yang ada, melainkan menekankan pentingnya penanda yang kuat dalam upaya pembentukan strategi hegemonik dengan perspektif publik yang baru. Tujuan utama dari perjuangan hegemonik dalam ruang publik demokrasi adalah untuk mendisartikulasikan praktik hegemonik yang telah ada dan berlangsung lama, serta menggantinya dengan transformasi hegemonik yang lebih progresif dan inklusif.

Dalam konteks ini, kaum marhenis dituntut untuk mampu menciptakan titik sentral (nodal point) dan formasi hegemonik sosial yang baru, sebagai sebuah dasar perjuangan yang mengutamakan prinsip *non-kooperasi* terhadap bentuk hegemonik yang sudah mapan. Prinsip *machtsvorming* (pembentukan kekuatan) menjadi arah perjuangan yang diperlukan untuk memobilisasi kekuatan sosial yang melibatkan massa marhaen. Massa marhaen, yang terdiri dari lapisan rakyat kecil,

Populisme Progresif (Berbasis Marhenisme)

Sejalan dengan momen populisme yang kita hadapi akibat dominasi hegemonik neoliberalisme dan berkembangnya politik identitas di Indonesia, perlu kiranya kaum marhenis merumuskan ulang taktik dan strategi perjuangan (*machtsvorming*) yang lebih sesuai dengan kepentingan rakyat marhaen. Strategi populisme progresif ini mengacu pada pandangan Chantal Mouffe, yang dapat dijalankan dalam kondisi krisis kapitalisme dan meluasnya politik identitas. Dalam konteks ini, strategi populisme progresif bertujuan untuk menyediakan jalan keluar yang tepat untuk memulihkan dan memperdalam cita-cita kesetaraan (makmur bareng) serta kedaulatan rakyat (marhen), yang merupakan elemen konstitutif dalam politik demokrasi yang sejati.

Namun, yang perlu dipahami adalah bahwa pada dasarnya populisme berfungsi sebagai slogan atau strategi diskursif yang membagi masyarakat menjadi beberapa kategori, yakni "aku" dan "mereka." Pembagian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menantang kelompok-kelompok yang dianggap sebagai bagian dari kekuatan dominan yang menindas rakyat banyak. Misalnya, dalam konteks Indonesia, kita dapat melihat pembagian seperti: rakyat marhaen versus oligarki, ekonomi berdikari versus ekonomi kapitalisme, kelompok Pancasila versus kelompok khilafah, Islam moderat versus Islam radikal, intelektual progresif marhenis versus intelektual konservatif kanan, serta politisi progresif marhenis versus politisi konservatif kanan dan politisi radikal agama.

Dalam hal ini, kaum marhenis harus mampu memanfaatkan ketegangan dan perbedaan yang ada di ruang publik untuk menggalang kekuatan sosial yang mendorong perubahan. Dengan menggali dan memperkuat solidaritas di antara kelompok-kelompok yang terpinggirkan, mereka dapat membentuk narasi alternatif yang lebih inklusif, berbasis pada kesetaraan dan keadilan sosial. Di sisi lain, penting untuk menyadari bahwa meskipun populisme progresif dapat menjadi alat untuk melawan dominasi neoliberalisme dan politik identitas yang eksklusif, ia harus tetap mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi yang mendalam, seperti partisipasi rakyat, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap keberagaman.

Sehingga, ketika kelompok populisme kanan, nasionalisme chauvinistik, atau kelompok radikal agama membangun kehendak kolektif dengan cara-cara xenofobia, seperti mengkotak-kotakan berdasarkan suku, agama, ras, perbedaan antara yang "asing" dan "pribumi", atau bahkan antara Islam dan kafir, kaum marhenis harus mampu menciptakan

strategi populisme progresif untuk mengontruksi kehendak kolektif yang baru. Kehendak kolektif ini harus berakar pada basis material kaum marhen, seperti isu kebangsaan, kesetaraan, kemakmuran, toleransi, hak buruh, kaum miskin, perlindungan data pribadi, gerakan perempuan, dan sebagainya. Dengan mengidentifikasi dan membangun strategi *non-kooperasi*, kaum marhenis bisa menggerakkan kekuatan *machtsvorming* yang diperlukan untuk menyatukan massa aksi, yaitu massa marhaen, guna memperjuangkan perubahan sosial yang lebih adil. Seperti apa yang dikatakan oleh Bung Karno dalam pokok - pokok ajaran Marhenisme;

Sebab, selama kita belum memiliki kekuasaan yang memadai untuk mendesak terkabulnya cita-cita tersebut, kita akan selalu berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang enggan memenuhi tuntutan-tuntutan kita, sekecil apapun itu. Tiap kemenangan, baik besar maupun kecil, adalah bagian dari perjuangan kita. Politik, bagi saya, bukanlah pertama-tama menciptakan ide, tetapi politik adalah menyusun suatu kekuasaan yang dapat mewujudkan ide-ide tersebut. (Ir. Sukarno)

Rekomendasi Internal Kaum Marhaen (Sosio – Digital)

Untuk memperkuat perjuangan kaum marhenis di tengah arus populisme kanan dan politik identitas yang berkembang di Indonesia, diperlukan langkah strategis di tingkat internal. Salah satu langkah penting adalah pembentukan tim cyber yang bertujuan untuk membangun kesadaran kolektif di kalangan kaum marhen, serta untuk merumuskan dan menjalankan strategi populisme progresif. Tim ini bisa berfokus pada pemanfaatan media digital untuk menyebarkan narasi yang mendukung perjuangan marhaenisme, sekaligus mengontraskan politik kelas dengan politik identitas yang semakin dominan. Selain itu, penting untuk mendirikan media alternatif yang berpihak pada isu-isu yang relevan dengan kaum marhaen, seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Media ini harus dapat mendorong munculnya tokoh-tokoh progresif dari organisasi GMNI dan progresif lainnya agar mampu membawa narasi yang lebih inklusif ke dalam ruang publik. Hal ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Fuch (2017) terkait dengan “Social Media and the Politics of Resistance” menyarankan bahwa media digital dapat menjadi alat yang efektif untuk memperjuangkan hak – hak kelas bawah dengan menyebarkan narasi yang membela kepentingan rakyat dan mengontraskan dengan narasi dominan politik identitas di ruang publik.

Penguatan politik kelas dan penekanan pada pemberdayaan sosial Dalam konteks populisme progresif, penguatan politik kelas harus menjadi bagian dari strategi organisasi. Gerakan marhen harus menekankan pada isu-isu kelas pekerja dan pengentasan kemiskinan dengan menggandeng segmen-segmen masyarakat yang marginal. Dengan memperkenalkan wacana baru yang menantang politik identitas yang terlalu mengedepankan perbedaan, Kemudian, menjalin kolaborasi antar organisasi dalam gerakan sosial Untuk memperkuat perjuangan marhenisme, kolaborasi antar organisasi yang memiliki visi serupa sangat penting. Dalam dunia digital yang semakin terhubung, berbagai kelompok atau organisasi yang menganut ideologi serupa bisa saling mendukung dalam memperluas jangkauan pengaruh mereka.

Pelatihan literasi digital untuk seluruh anggota organisasi juga menjadi hal yang tak kalah penting. Dengan meningkatnya penggunaan media sosial, anggota dari pusat hingga cabang bahkan alumni perlu dilatih untuk mengenali dan menghindari informasi yang tidak valid, serta

memiliki kemampuan untuk memanfaatkan platform digital dalam mendukung gerakan progresif. Di sisi lain, dorongan untuk tumbuhnya demokrasi radikal dalam bentuk sosio-demokrasi harus terus digalakkan. Ini bertujuan untuk mengembalikan mandat kekuasaan kepada rakyat, terutama kepada kaum marhaen yang selama ini sering terabaikan dalam proses politik. Konter narasi politik identitas yang berkembang, harus dilakukan dengan menghidupkan kembali politik kelas marhaen yang berfokus pada pengentasan kemiskinan ekstrem, perluasan akses terhadap layanan kesehatan melalui BPJS, penguatan sektor UMKM, dan penerapan kebijakan seperti Universal Basic Income (UBI) yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat bawah.

Rekomendasi Eksternal Kaum Marhaen (Sosio – Digital)

Di tingkat eksternal, perlu ada upaya untuk mendorong pemerintah agar lebih serius dalam melindungi data pribadi warganya dengan mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi untuk segera disahkan. Selain itu, penting juga bagi pemerintah Indonesia dan DPR untuk segera membuat regulasi yang mengatur perusahaan-perusahaan platform digital, seperti Google, Facebook, Instagram, X, dan Amazon, yang semakin memegang peranan penting dalam kehidupan politik dan sosial masyarakat. Platform-platform ini harus bertanggung jawab atas penyebaran narasi Disinformasi, hoaks, ujaran kebencian (hate speech), serta polarisasi sosial yang dapat memecah belah bangsa. Regulasi ini juga harus mengatur algoritma yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan digital tersebut yang sering kali memanipulasi informasi untuk keuntungan komersial mereka.

Di sisi lain, revisi terhadap Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) juga perlu dipertimbangkan, terutama terkait pasal-pasal yang dianggap menghambat implementasi demokrasi radikal atau sosio-demokrasi. Undang-Undang ini perlu disesuaikan agar dapat mendukung kebebasan berekspresi, sekaligus menjaga keterbukaan dan keberagaman dalam ruang publik digital.

Terakhir, diperlukan pembuatan pedoman atau blueprint (Sosio -Digital) yang jelas mengenai batasan kebebasan berbicara dan berpendapat di ruang publik dalam sistem demokrasi Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat dalam berkomunikasi dan berpendapat tetap dijaga, dengan menghindari penyebaran konten yang merugikan atau memecah belah masyarakat. Sehingga isu politik yang berbasis rakyat marhaen menjadi arus utama di ruang publik yang harus terus di perhatikan oleh pemerintah yang ada. Dengan harapan tumbuhnya kebijakan politik yang berbasis pada masalah kerakyatan dan khususnya marhaen.

Kesimpulan

Populisme kanan di Indonesia lahir dari fenomena narasi di ruang digital berbentuk politik identitas tujuannya untuk memecah belah masyarakat melalui sentimen rasial, keagamaan, dan kesukuan. Politik identitas ini mengabaikan perjuangan kelas yang seharusnya menjadi fokus utama dalam memperjuangkan keadilan sosial dan ekonomi untuk rakyat marhaen. Di ruang publik, terutama di media sosial, narasi kebencian dan hoaks semakin berkembang, sementara platform digital lebih mementingkan keuntungan komersial tanpa memperhatikan dampak sosialnya.

Kaum marhenis, yang mengusung prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan sosial, perlu memperkuat gerakan sosial dan membangun narasi yang lebih inklusif untuk melawan dominasi politik identitas yang eksklusif. Salah satu alternatif yang dapat dijalankan adalah melalui demokrasi deliberatif dan sosio-demokrasi, yang mengedepankan partisipasi rakyat dan pemberdayaan ekonomi rakyat, bukan hanya kepentingan segelintir elit. Dengan

demikian, kaum marhenis harus fokus pada isu-isu sosial yang relevan bagi rakyat banyak, seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan perlindungan kelompok marginal.

Strategi populisme progresif marhenisme yang berbasis pada solidaritas sosial dan penguatan politik kelas dapat menjadi jawaban untuk mengatasi ketimpangan sosial dan politik identitas yang mengancam persatuan bangsa. Selain itu, di tingkat digital, penting untuk memperkuat literasi digital, membangun media alternatif yang berpihak pada rakyat marhaen, serta mendesak pemerintah untuk lebih serius dalam melindungi data pribadi warganya dan mengatur platform digital yang semakin berperan dalam kehidupan politik.

Daftar Pustaka

- Chantal Mouffe. (2018). *For a Left Populism*. Verso Books
- Soekarno. Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid I. Jakarta: Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, 1963.
- Erik Ardiyanto. (2023). *Komunikasi Politik: Aktivisme dan Sosialisme (dari Bernie Sander, Alexandria Ocasio Cortez, Jeremy Corbyn)*. GDN PRESS
- Fuchs, C. (2017). *Social Media and the Politics of Resistance*. Information, Communication & Society, 20(3), 1-16.
- Goodwin, M., & Heath, O. (2016). *The 2016 Referendum, Brexit and the Left Behind: A Comparative Analysis of the UK and the USA*. *The Political Quarterly*, 87(3), 323-332.
- Harvey, D. (2005). *A Brief History of Neoliberalism*. Oxford University Press
- Ir. Sukarno. (2019). *Pokok – Pokok Ajaran Marhaenime menurut Bung Karno*. Yogyakarta, Penerbit Media Presindo
- Jurgen Habermas. (1991). *The Structural Transformation of The Public Sphere, An inquiry into a Category of Bourgeois Society*, Translated by Thomas Burger and the assistance of Frederick Lawrence. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts - Lee McIntyre.(2018). *Post – Truth*. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts
- Materi Kongres IV Persatuan Alumini GMNI. (2021) “*Nasionalisme Menjawab Tantangan Zaman*” DPP PA GMNI
- Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. Profile Books

How to Cite

POPULISME PROGRESIF MARHAENISME: ANTARA IDE SOSIO-DEMOKRASI DAN REALITAS SOSIO-DIGITAL. (2025). *Jurnal Persatuan Nasional*, 2(1): 30-39. <https://jurnalpersatuannasional.id/index.php/jpnasional/article/view/14>

License

Copyright (c) 2025 Jurnal Persatuan Nasional



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).